

**The Effect of Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, and Fiscal Independence on
Financial Distress of Local Governments in Regencies and Cities in Indonesia
for the 2022-2023 Period**

Atha Athaya¹
Rindu Rika Gamayuni²
Universitas Lampung^{1,2}

Received 9 Oktober 2025
Revised 16 Oktober 2025
Accepted 22 Oktober 2025

¹E-mail: aathatha86@gmail.com ²E-mail: rindu.rika@feb.unila.ac.id ¹Correspondence Author

ABSTRACT

Purpose – This study aims to examine the effect of effectiveness ratio, efficiency ratio, and fiscal independence on financial distress in local governments of regencies and cities in Indonesia for the 2022-2023 period.

Design/methodology/approach – This research uses a quantitative method with secondary data obtained from the audited Local Government Financial Reports (LKPD) and the Fiscal Capacity Index issued by the Ministry of Finance. The analysis was conducted using binary logistic regression.

Findings – The results show that the effectiveness ratio has a negative and significant effect on financial distress, while the efficiency ratio has a positive and significant effect. Fiscal independence has a negative and significant effect, indicating that higher autonomy reduces the risk of fiscal distress.

Originality – This study provides empirical evidence on how local government financial performance affects fiscal distress by integrating effectiveness, efficiency, and fiscal independence ratios in one model.

Keywords: Effectiveness Ratio, Efficiency Ratio, Fiscal Independence, Financial Distress, Local Government.

Paper Type Research Result



Contemporary
Journal on Business
and Accounting
© Institut
Transparansi dan
Akuntabilitas Publik
(INSPIRING)

**Pengaruh Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi dan Kemandirian Fiskal terhadap
Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia
Periode 2022-2023**

Atha Athaya¹
Rindu Rika Gamayuni²
Universitas Lampung^{1,2}

¹E-mail: aathatha86@gmail.com | ²E-mail: rindu.rika@feb.unila.ac.id | ¹Correspondence Author

ABSTRAK

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal terhadap financial distress pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia periode 2022-2023.

Desain/Metode/Pendekatan – Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit serta Indeks Kapasitas Fiskal yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Analisis data dilakukan menggunakan regresi logistik biner.

Temuan – Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress, rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan kemandirian fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap financial distress. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah yang efektif, efisien, dan mandiri dapat menurunkan risiko tekanan fiskal.

Originalitas/Nilai - Penelitian ini memberikan bukti empiris mengenai bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah memengaruhi kondisi financial distress dengan mengintegrasikan tiga indikator utama, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal dalam satu model analisis.

Kata-kata Kunci: *Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Kemandirian Fiskal, Financial Distress, Pemerintah Daerah*

Jenis Artikel *Research Result*

PENDAHULUAN

Pemerintah daerah di Indonesia memiliki peran penting dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Melalui kebijakan desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan luas untuk mengelola sumber daya keuangan secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan mandiri.

Rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal merupakan indikator utama dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah. Rasio efektivitas mencerminkan kemampuan daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan, sedangkan rasio efisiensi mengukur sejauh mana pemerintah daerah mampu menggunakan sumber daya secara optimal untuk menghasilkan output maksimal dengan biaya minimal. Sementara itu, kemandirian fiskal menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kebutuhan fiskalnya tanpa ketergantungan dominan pada transfer dari pemerintah pusat.

Namun pada kenyataannya, tidak semua pemerintah daerah di Indonesia mampu mengelola keuangannya secara efektif dan mandiri. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Tahun Anggaran 2022, masih terdapat sejumlah kabupaten/kota yang memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) bahkan Tidak Menyatakan Pendapat (Disclaimer). Kondisi ini menunjukkan masih lemahnya tata kelola keuangan di beberapa daerah, yang dapat mengindikasikan adanya tekanan keuangan atau *financial distress*. Selain itu, lebih dari 80% pemerintah daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, terutama Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang menandakan rendahnya tingkat kemandirian fiskal.

Perbedaan kapasitas fiskal antar daerah juga menunjukkan adanya ketimpangan dalam kemampuan pengelolaan keuangan. Misalnya, beberapa kota besar seperti Medan dan Makassar memiliki kapasitas fiskal sangat tinggi, sementara daerah lain seperti Ambon dan Jayapura masih berada pada kategori rendah selama dua tahun berturut-turut. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah lebih rentan mengalami *financial distress* akibat keterbatasan dalam mengoptimalkan PAD dan efisiensi belanja daerah.

Fenomena *financial distress* di pemerintah daerah juga terlihat dari berbagai kasus defisit anggaran, keterlambatan pembayaran gaji ASN, hingga penundaan kegiatan pembangunan. Kondisi tersebut menggambarkan lemahnya pengelolaan fiskal dan rendahnya kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas keuangan. Dalam konteks ini, teori agensi menjadi dasar teoritis yang relevan untuk menjelaskan hubungan antara masyarakat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen pengelola sumber daya publik. Kegagalan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan secara efektif dan efisien mencerminkan adanya

ketidaksesuaian kepentingan antara agen dan prinsipal, yang dapat meningkatkan risiko *financial distress*.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk meneliti sejauh mana rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal berpengaruh terhadap *financial distress* pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara empiris pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap kondisi keuangan pemerintah kabupaten/kota di Indonesia pada periode 2022-2023. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan literatur mengenai kinerja keuangan daerah serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal guna mencegah terjadinya *financial distress* di masa mendatang.

LANDASAN TEORI

Teori Agensi (Agency Theory)

Penelitian ini menggunakan teori agensi (*agency theory*) yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) untuk menjelaskan hubungan kontraktual antara pihak prinsipal dan agen. Dalam konteks pemerintahan daerah, masyarakat bertindak sebagai prinsipal yang memberikan mandat kepada pemerintah daerah sebagai agen untuk mengelola sumber daya publik demi kesejahteraan masyarakat. Teori ini relevan karena menggambarkan potensi konflik kepentingan akibat asimetri informasi, di mana agen memiliki informasi lebih banyak dibandingkan prinsipal (Eisenhardt, 1989).

Dalam pengelolaan keuangan daerah, teori agensi menekankan pentingnya efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada publik. Kinerja yang efektif dan efisien menunjukkan agen menjalankan tugas sesuai kepentingan prinsipal. Sebaliknya, rendahnya efektivitas, efisiensi, atau kemandirian fiskal mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan dan berpotensi menyebabkan *financial distress* (Kurniawan & Arza, 2019; Lestari & Suryani, 2022).

Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi sektor publik berperan penting dalam menyediakan informasi keuangan yang relevan dan andal untuk mendukung transparansi serta akuntabilitas pemerintah daerah (Halim, 2014). Melalui laporan keuangan daerah, dapat diukur sejauh mana pemerintah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal digunakan sebagai indikator untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah, yang pada akhirnya mencerminkan kemampuan fiskal daerah dalam menghindari kondisi *financial distress*.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah direncanakan

dibandingkan dengan potensi riilnya (Halim, 2007; Mardiasmo, 2018). Rasio ini dihitung dengan membandingkan antara realisasi PAD dengan target PAD yang ditetapkan, sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai rasio efektivitas, semakin baik kemampuan pemerintah daerah dalam menggali dan mengoptimalkan sumber pendapatan yang dimiliki untuk mencapai target penerimaan daerah. Nilai rasio efektivitas yang tinggi mencerminkan kinerja penerimaan PAD yang baik, menunjukkan stabilitas fiskal daerah, serta kemampuan pemerintah daerah dalam menghindari tekanan keuangan (*financial distress*). Oleh karena itu, dalam penelitian ini, rasio efektivitas diperkirakan berpengaruh negatif terhadap *financial distress*, karena peningkatan efektivitas PAD menandakan peningkatan kemampuan fiskal daerah dalam menjaga keseimbangan keuangan.

Tabel 1. Kategori Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas (%)	Kriteria
100	Sangat Efektif
90-100	Efektif
80-90	Cukup Efektif
60-80	Kurang Efektif
< 60	Tidak Efektif

Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi digunakan untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu mengelola belanja daerah secara efisien terhadap pendapatan yang diperoleh. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Rasio Efisiensi Belanja Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Rasio efisiensi menunjukkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang dihasilkan (Halim, 2012). Pemerintah dianggap efisien apabila nilai rasio ini rendah, karena menunjukkan bahwa biaya yang digunakan untuk memperoleh pendapatan relatif kecil. Sebaliknya, rasio efisiensi yang tinggi mengindikasikan inefisiensi dalam pengelolaan belanja daerah (Mardiasmo, 2018). Kondisi tersebut mencerminkan lemahnya efektivitas penggunaan anggaran dan dapat memperbesar risiko terjadinya *financial distress*. Dengan demikian, secara teoritis terdapat hubungan positif antara rasio efisiensi dan *financial distress*, di mana peningkatan nilai rasio efisiensi menunjukkan meningkatnya risiko tekanan fiskal pada pemerintah daerah.

Tabel 2. Kategori Rasio Efisiensi

Rasio Efisiensi (%)	Kriteria
> 100	Tidak Efisien
90-100	Kurang Efisien
80-90	Cukup Efisien
60-80	Efisien
< 60	Sangat Efisien

Kemandirian Fiskal

Kemandirian fiskal menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah mampu membiayai kebutuhan fiskalnya dari sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa bergantung secara dominan pada transfer dari pemerintah pusat (Mahsun, 2013; Mahmudi, 2019). Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Kemandirian Fiskal} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Semakin tinggi nilai rasio kemandirian fiskal, semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan secara mandiri dan menjaga stabilitas keuangannya. Sebaliknya, tingkat kemandirian fiskal yang rendah menunjukkan ketergantungan tinggi pada dana transfer pusat, yang dapat mengindikasikan lemahnya kapasitas fiskal daerah dan meningkatnya potensi terjadinya *financial distress*. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kemandirian fiskal diperkirakan memiliki pengaruh negatif terhadap *financial distress*.

Tabel 3. Kategori Kemandirian Fiskal

Kemandirian Fiskal (%)	Kriteria
0-25	Rendah Sekali
25-50	Rendah
50-75	Sedang
75-100	Tinggi
> 100	Tinggi Sekali

Financial Distress

Financial distress pada pemerintah daerah merupakan kondisi ketika suatu daerah mengalami tekanan keuangan yang signifikan sehingga tidak mampu memenuhi kewajiban fiskal maupun menyediakan layanan publik secara optimal. Kondisi ini umumnya ditandai dengan terjadinya defisit anggaran secara berulang, ketergantungan yang tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, serta menurunnya kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pelayanan publik (Halim, 2014; Jones & Walker, 2007). Dalam penelitian ini, *financial distress* diukur menggunakan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan berdasarkan ketentuan Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) No.107/PMK.07/2018. Indeks tersebut mencerminkan kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan keuangannya secara mandiri. Semakin rendah kapasitas fiskal suatu daerah, semakin besar pula indikasi terjadinya *financial distress*.

Untuk kepentingan analisis empiris, variabel *financial distress* diklasifikasikan dalam bentuk variabel dummy, dengan ketentuan sebagai berikut: nilai 1 diberikan kepada daerah yang mengalami *financial distress* (termasuk kategori kapasitas fiskal sangat rendah, rendah, atau sedang), sedangkan nilai 0 diberikan kepada daerah yang tidak mengalami *financial distress* (kategori kapasitas fiskal tinggi atau sangat tinggi). Pendekatan ini memungkinkan identifikasi kondisi tekanan fiskal pemerintah daerah secara lebih terukur dan obyektif berdasarkan kapasitas fiskal aktual yang dimiliki oleh masing-masing daerah.

METODE PENELITIAN

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif-verifikatif. Pendekatan ini digunakan untuk menguji pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal terhadap *financial distress* pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia pada periode 2022–2023. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari lembaga resmi pemerintah, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Data utama yang digunakan mencakup Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh BPK, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh BPS, serta Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD) yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 193 Tahun 2022 dan PMK Nomor 84 Tahun 2023. Data tersebut diolah menjadi rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio kemandirian fiskal sebagai variabel independen, serta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) sebagai indikator pengukuran *financial distress*.

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia sebanyak 514 entitas. Namun, penelitian hanya menggunakan 508 pemerintah daerah otonom, karena enam wilayah di Provinsi DKI Jakarta tidak berstatus sebagai daerah otonom. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *non-probability sampling* dengan metode *sampling jenuh*, yaitu seluruh anggota populasi dijadikan sampel. Dengan periode penelitian dua tahun (2022-2023), jumlah observasi keseluruhan adalah 1.016 data (508 kabupaten/kota × 2 tahun).

Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan mengakses publikasi resmi dari BPK, BPS, dan Kementerian Keuangan. Dokumen yang dikumpulkan mencakup LKPD, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah, serta PMK terkait IKFD. Seluruh data diolah secara sistematis untuk menghasilkan nilai rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal yang menjadi dasar analisis.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan dua tahap, yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi logistik biner. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data penelitian, meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi dari setiap variabel.

Selanjutnya, analisis regresi logistik biner digunakan untuk menguji pengaruh rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan kemandirian fiskal terhadap probabilitas terjadinya financial distress pada pemerintah daerah. Variabel dependen dalam model bersifat kategorik, dengan kode 1 untuk daerah yang mengalami financial distress dan kode 0 untuk yang tidak mengalami financial distress.

Model regresi logistik yang digunakan dirumuskan sebagai berikut:

$$\ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = \alpha + \beta_1(\text{REP}) + \beta_2(\text{RE}) + \beta_3(\text{KF}) + \varepsilon$$

Keterangan:

- P = Probabilitas terjadinya financial distress
- α = Konstanta
- β_1 - β_3 = Koefisien regresi variabel independen
- REP = Rasio Efektivitas
- RE = Rasio Efisiensi
- KF = Kemandirian Fiskal
- ε = Error term

Uji kelayakan model dilakukan melalui *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*, *Omnibus Test of Model Coefficients*, dan *Nagelkerke R Square*. Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan *Wald Test* dengan tingkat signifikansi 5% untuk menilai pengaruh masing-masing variabel independen terhadap financial distress.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang bersumber dari publikasi resmi lembaga pemerintah, yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang telah diaudit oleh BPK RI, Statistik Keuangan Pemerintah Daerah dari BPS, serta data Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Populasi penelitian mencakup seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia dengan total 514 daerah. Setelah mengecualikan 6

wilayah DKI Jakarta karena status administratif khusus, jumlah sampel penelitian menjadi 508 daerah, dengan dua tahun pengamatan (2022-2023) sehingga total observasi sebanyak 1.016 data.

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data dari masing-masing variabel penelitian yang digunakan, yaitu Rasio Efektivitas (X_1), Rasio Efisiensi (X_2), Kemandirian Fiskal (X_3), dan Financial Distress (Y). Tabel 1 berikut menunjukkan hasil uji statistik deskriptif menggunakan data sekunder dari 508 pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia periode 2022-2023.

Tabel 4. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
FD	1016	,00	1,00	,7018	,45771
REP	1016	,08	8,71	1,0512	,52857
RE	1016	,66	1,46	1,0069	,06662
KF	1016	,00	6,95	,1763	,30613
Valid N (listwise)	1016				

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 26 (2025)

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa variabel Rasio Efektivitas (REP) memiliki nilai minimum sebesar 8%, nilai maksimum sebesar 871%, nilai rata-rata sebesar 105,12%, dan standar deviasi sebesar 52,857%. Hasil ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pemerintah daerah di Indonesia telah mencapai tingkat efektivitas yang baik dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD), karena sebagian besar daerah mampu melampaui target penerimaan yang ditetapkan. Namun, rentang nilai yang lebar antara minimum dan maksimum mencerminkan adanya perbedaan kemampuan yang cukup besar antar pemerintah daerah dalam mengoptimalkan sumber PAD-nya. Variabel Rasio Efisiensi (RE) memiliki nilai minimum sebesar 66%, nilai maksimum sebesar 146%, dengan rata-rata sebesar 100,69% dan standar deviasi 6,662%. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum pemerintah daerah masih berada pada kategori tidak efisien dalam mengelola belanja, karena rata-rata pengeluaran yang dilakukan sedikit lebih besar daripada pendapatan yang diterima, meskipun tingkat variasi antar daerah relatif kecil.

Selanjutnya, variabel Kemandirian Fiskal (KF) memiliki nilai minimum sebesar 0%, nilai maksimum sebesar 695%, nilai rata-rata sebesar 17,63%, dan standar deviasi sebesar 30,613%. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar pemerintah daerah masih memiliki tingkat kemandirian fiskal yang rendah dan

masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Meskipun demikian, terdapat beberapa daerah dengan tingkat kemandirian yang tinggi, menunjukkan keberhasilan dalam mengoptimalkan PAD sebagai sumber pembiayaan daerah. Adapun variabel Financial Distress (FD) memiliki nilai minimum sebesar 0%, nilai maksimum sebesar 100%, dengan nilai rata-rata 70,18% dan standar deviasi 45,771%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia cenderung berada dalam kondisi tekanan fiskal (*financial distress*), namun terdapat variasi yang cukup besar antar daerah, di mana beberapa daerah masih mampu menjaga stabilitas fiskalnya.

Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit Test)

Uji Hosmer and Lemeshow digunakan untuk mengukur kesesuaian model regresi logistik dengan data empiris. Model dinyatakan fit apabila nilai signifikansi $\geq 0,05$.

Tabel 5. Hasil Uji Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Statistic

Step	Chi-square	df	Sig.
1	7,337	8	,501

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 26 (2025)

Nilai signifikansi sebesar $0,501 > 0,05$ menunjukkan bahwa model regresi logistik yang digunakan telah sesuai dengan data empiris, sehingga model layak digunakan dalam analisis selanjutnya.

Uji Keseluruhan Model (Overall Model Fit Test)

Uji Overall Model Fit dilakukan untuk menilai kecocokan model regresi logistik secara keseluruhan dengan dua indikator utama: nilai $-2 \text{ Log Likelihood}$ ($-2LL$) dan *Omnibus Test of Model Coefficients*.

Tabel 6. Overall Model Fit Test

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients Constant	
	1	429,308	1,727
	2	382,766	2,373
Step 0	3	379,744	2,592
	4	379,718	2,615
	5	379,718	2,615

Iteration	-2 Log likelihood	Coefficients				
		Constant	REP	RE	KF	
	1	326,478	-1,433	-,851	4,203	-,831
	2	191,046	-5,121	-1,905	10,166	-2,439
	3	138,328	-8,910	-3,081	16,365	-3,912
	4	120,695	-11,546	-4,222	21,310	-5,141
Step 1	5	116,563	-13,200	-5,073	24,703	-6,055
	6	116,162	-13,872	-5,433	26,122	-6,451
	7	116,156	-13,964	-5,482	26,317	-6,506
	8	116,156	-13,966	-5,483	26,320	-6,507
	9	116,156	-13,966	-5,483	26,320	-6,507

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 26 (2025)

Hasil uji menunjukkan bahwa nilai *-2 Log Likelihood* turun dari 379,718 (Block 0) menjadi 116,156 (Block 1). Penurunan yang signifikan ini menunjukkan bahwa penambahan variabel independen (REP, RE, dan KF) meningkatkan kemampuan model dalam menjelaskan variasi data, sehingga model dinyatakan baik dan layak digunakan.

Tabel 7. Omnibus Test of Model Coefficients

		Chi-square	df	Sig.
Step 1	Step	263,562	3	,000
	Block	263,562	3	,000
	Model	263,562	3	,000

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 26 (2025)

Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwa secara simultan variabel Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Kemandirian Fiskal berpengaruh signifikan dalam memprediksi Financial Distress.

Uji Koefisien Determinasi (Nagelkerke R Square)

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen.

Tabel 8. Nilai Nagelkerke R Square

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	116,156 ^a	,292	,745

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 26 (2025)

Nilai Nagelkerke R Square sebesar 0,745 menunjukkan bahwa variabel Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, dan Kemandirian Fiskal mampu menjelaskan variasi Financial Distress sebesar 74,5%, sedangkan 25,5% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian.

Hasil Uji Regresi Logistik

Model regresi logistik digunakan karena variabel dependen *Financial Distress* bersifat dummy (1 = distress, 0 = tidak distress).

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Logistik

		B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 1 ^a	REP	-,495	,157	9,941	1	,002	,609
	RE	2,894	1,128	6,583	1	,010	18,061
	KF	-,953	,359	7,041	1	,008	,386
	Constant	-1,355	1,165	1,354	1	,245	,258

Sumber: Hasil Output SPSS Versi 26 (2025)

Persamaan regresi logistik yang terbentuk adalah:

$$\ln\left(\frac{P}{1-P}\right) = -1,355 - 0,495(\text{REP}) + 2,894(\text{RE}) - 0,953(\text{KF})$$

Berdasarkan hasil uji parsial (Uji Wald), ketiga variabel independen berpengaruh signifikan terhadap *Financial Distress*. Rasio efektivitas dan kemandirian fiskal berpengaruh negatif, sedangkan rasio efisiensi berpengaruh positif. Artinya, semakin tinggi efektivitas dan kemandirian fiskal, maka risiko *financial distress* menurun, sedangkan peningkatan inefisiensi akan meningkatkan risiko distress.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio efektivitas berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD, semakin kecil kemungkinan terjadinya tekanan fiskal. Temuan ini mendukung teori keagenan (Agency Theory), di mana pemerintah daerah sebagai agen harus mengelola keuangan publik secara efektif untuk kepentingan masyarakat (prinsipal).

Selanjutnya, rasio efisiensi berpengaruh positif signifikan terhadap *financial distress*. Hal ini berarti semakin tidak efisien pengelolaan belanja daerah, semakin besar risiko mengalami kesulitan fiskal. Inefisiensi mencerminkan lemahnya tata kelola keuangan dan rendahnya akuntabilitas fiskal.

Sementara itu, kemandirian fiskal berpengaruh negatif signifikan terhadap *financial distress*. Semakin tinggi kemandirian fiskal, semakin kuat kemampuan daerah membiayai kebutuhannya tanpa ketergantungan pada dana transfer pusat. Temuan ini mendukung prinsip *New Public Management* (NPM) yang menekankan pentingnya otonomi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal merupakan indikator penting dalam menjaga stabilitas keuangan pemerintah daerah. Peningkatan kinerja keuangan pada tiga aspek tersebut akan memperkuat ketahanan fiskal daerah dan menurunkan potensi *financial distress*.

SIMPULAN

Berdasarkan pengujian dan analisis data yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini membuktikan bahwa rasio efektivitas berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress* pemerintah daerah kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini berarti semakin tinggi efektivitas realisasi pendapatan daerah dibandingkan targetnya, semakin rendah kemungkinan daerah mengalami tekanan keuangan.
2. Rasio efisiensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap *financial distress*. Artinya, semakin tinggi tingkat inefisiensi belanja, semakin besar potensi pemerintah daerah menghadapi kondisi *distress*.
3. Kemandirian fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *financial distress*, yang menunjukkan bahwa semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap pendapatan total, semakin kuat ketahanan fiskal daerah dalam menghindari risiko *distress*.
4. Secara keseluruhan, kinerja keuangan daerah melalui efektivitas pendapatan, efisiensi belanja, dan kemandirian fiskal merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan mencegah *financial distress*.
5. Keterbatasan penelitian ini terletak pada variabel independen yang terbatas pada rasio efektivitas, efisiensi, dan kemandirian fiskal serta periode penelitian yang hanya mencakup dua tahun (2022–2023). Penelitian berikutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain, baik keuangan maupun non-keuangan, serta memperpanjang periode analisis agar hasilnya lebih komprehensif.
6. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, memperkuat kemandirian fiskal, serta menjadi acuan bagi pembuat kebijakan

dalam merumuskan strategi pencegahan financial distress sesuai prinsip tata kelola keuangan daerah yang baik.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdullah, S. (2017). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. KINERJA, 8(2), 209-210. <https://doi.org/10.24002/kinerja.v8i2.898>
- Altman, E. I., & Hotchkiss, E. (2011). *Corporate financial distress and bankruptcy: Predict and avoid bankruptcy, analyze and invest in distressed debt* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
- Albasiah. (2013). *Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Amua, A. P., Niswatin, & Yusuf, N. (2023). Analisis realisasi pendapatan asli daerah dengan menggunakan rasio efektivitas, efisiensi, dan rasio pertumbuhan di Badan Keuangan Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 2(3), 291–307. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1012345>
- Clark, T. N. (1997). *The new political culture*. Westview Press.
- Diah Novita Sari, & Murtanto. (2024). Analisis efektivitas pendapatan asli daerah terhadap kapasitas fiskal pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Publik*, 9(1), 55–70.
- Dina Nurfauziyyah. (2024). *Literature review tentang financial distress yang terbit di jurnal SINTA*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 9(2), 225–240. <https://doi.org/10.33772/jakuho.v9i2.152>
- Dwi Tia Ningrum, & Sholihah, R. A. (2022). Financial distress government ditinjau dari rasio keuangan dan kemandirian keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, 12(2), 77–89.
- Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. *Academy of Management Review*, 14(1), 57–74. <https://doi.org/10.5465/amr.1989.4279003>
- Elfiyana, & Arza, F. I. (2022). The influence of local government characteristics and financial factors on financial distress conditions in Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 4(2), 425–437. <https://doi.org/10.24036/jea.v4i2.500>
- FITRA Riau. (2025). *Laporan defisit anggaran dan keterlambatan DBH Kota Pekanbaru*. <https://fitra.or.id>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25* (9th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Hadinata, D. F., Sitompul, F. M., Nainggolan, F. E., & Tambunan, N. N. (2024). Analisis rasio efektivitas dan rasio efisiensi keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kota Pematang Siantar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 2(2), 496–502. <https://doi.org/10.61722/jjem.v2i2.993>
- Halim, A. (2014). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2012). *Akuntansi sektor publik: Teori, konsep, dan aplikasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Islamiyah, F., Putra, Y., & Ramadhan, R. (2022). Desentralisasi fiskal dan financial distress pemerintah daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 37(1), 55–70.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360. [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(76\)90026-X](https://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X)
- Jones, S., & Walker, R. G. (2007). Explanators of local government distress. *Abacus*, 43(3), 396–418. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.2007.00236.x>
- Kurniawan, Y., & Arza, F. I. (2019). Analisis financial distress pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 10(1), 124–140. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2019.10.1.08>
- Lailiyah, N. I., & Desitama, F. S. (2023). Kemandirian keuangan, rasio efisiensi, rasio solvabilitas anggaran, dan rasio pertumbuhan terhadap financial distress pemerintah daerah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(3), 1952–1973. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i3.5868>
- Lestari, D., & Suryani, T. (2022). Determinan financial distress pemerintah daerah: Studi pada pemerintah provinsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*, 17(2), 115–130. <https://doi.org/10.24843/jiab.2022.v17.i02.p04>
- Mahmudi. (2019). *Manajemen kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mahsun, M. (2013). *Akuntansi sektor publik*. BPFE Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nurhayati, T. (2021). Analisis rasio keuangan terhadap potensi financial distress pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(1), 55–68.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 107/PMK.07/2018 tentang Kapasitas Fiskal Daerah.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2022.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 84/PMK.07/2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2023.
- Pradana, I., & Sarjiyanto, B. (2023). Pengaruh efisiensi belanja terhadap kerentanan fiskal daerah di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Publik*, 7(1), 77–90.
- Scott, W. R. (2015). *Financial accounting theory* (7th ed.). Toronto: Pearson.
- Syurmita. (2014). Analisis kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 22(2), 189–204.
- Udayana, K. A., Hidayat, A. S., & Yuniati, S. A. (2022). Relevansi skala optimum belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan financial distress kabupaten/kota di Provinsi Maluku. *Jurnal Manajemen Perbendaharaan*, 3(1), 71–89. <https://doi.org/10.33105/jmp.v3i1.426>
- Widjaja, H. (2002). *Otonomi daerah dan daerah otonom*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, R., & Prasetyo, D. (2021). Struktur belanja dan risiko financial distress pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 8(2), 133–148.